

# ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-5 Bulan September 2021 (tanggal 24 s.d. 30 September)



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA KASUS STUNTING DI INDONESIA

Fieka Nurul Arifa  
Peneliti Pertama/Studi Pendidikan  
Fieka.arifa@dpr.go.id

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Pandemi Covid-19 telah membuat anak-anak Indonesia yang dalam masa pertumbuhan lebih rentan mengalami stunting. Pandemi menambah tantangan pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Saat ini, Indonesia masih berada di peringkat kedua tertinggi di kawasan ASEAN setelah Kamboja. Angka prevalensi statistik Indonesia masih menunjukkan presentasi yang cukup tinggi. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka prevalensi stunting dunia tahun 2020 yaitu 22%.

Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 10 provinsi yang masih memiliki jumlah kasus stunting yang tinggi, di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, diprediksi ada 3 provinsi yang mengalami kenaikan jumlah kasus stunting pada tahun 2021. Ketiga provinsi tersebut adalah Sulawesi Barat yang diprediksi naik 0,07, Nusa Tenggara Barat naik 0,3 dan Bangka Belitung yang diprediksi mengalami kenaikan 1,01. Kerentanan yang lebih tinggi dialami anak-anak usia 0-2 tahun yang berpotensi mengalami stunting.

Pandemi Covid-19 menghambat kegiatan-kegiatan pencegahan stunting, antara lain layanan kepada masyarakat, posyandu klub ibu hamil, Bina Keluarga balita atau PAUD. Akibat pandemi, akses penduduk miskin terhadap pangan makin terhambat karena adanya hambatan produksi dan distribusi. Belum lagi pandemi membuat masyarakat kelas bawah rentan kehilangan pendapatan sehingga berdampak pada berkurangnya kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Anak-anak korban Covid-19 yang kehilangan orang tua juga berpotensi mengalami penurunan kualitas hidup seperti pengasuhan kesehatan dan pendidikan yang akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak.

Masalah stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor dan melibatkan seluruh stakeholder secara terintegrasi, sehingga pagu anggaran harus tersebar di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2021, pagu awal K/L sebagai dukungan anggaran pencegahan stunting sudah dialokasikan sebesar Rp32,98 triliun. Sementara TKDD selain dari penambahan alokasi anggaran DAK fisik sebesar Rp7,35 triliun. Dukungan pencegahan stunting juga diperluas dengan menambah bidang lingkungan hidup untuk DAK fisik, di samping anggaran DAK non fisik yang dialokasikan Rp4,1 triliun.

Perlu perhatian seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku di bidang kesehatan, pihak swasta, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, hingga media massa terhadap kasus stunting dan upaya percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia.

Dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menjadi payung hukum bagi kementerian lembaga, diharapkan persoalan stunting ini dapat diselesaikan dengan cepat dan dapat mencapai target 14% pada tahun 2024 nanti.

### SUMBER

Kompas.com., 23 Agustus 2021; Media Indonesia, 29 September 2021; Republika, 29 September 2021.